

**PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL DALAM MEMEDIASI
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN PERAN AUDITOR
INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD PADA
PEMERINTAHAN PROVINSI PAPUA BARAT**

***THE EFFECT OF INTERNAL CONTROL IN MEDIATION OF
ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS AND THE ROLE
OF INTERNAL AUDITORS ON FRAUD PREVENTION IN
WEST PAPUA PROVINCE GOVERNMENT***

**ANASTASIA OHOWAY
A062191020**



**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**



**PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL DALAM MEMEDIASI
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN PERAN AUDITOR
INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD PADA
PEMERINTAHAN PROVINSI PAPUA BARAT**

Tesis

sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar magister

Program Studi Magister Akuntansi

Disusun dan diajukan oleh

ANASTASIA OHOIWAY
A062191020



Kepada

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**



Optimized using
trial version
www.balesio.com

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL DALAM MEMEDIASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN PERAN AUDITOR INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD PADA PEMERINTAHAN PROVINSI PAPUA BARAT.

Disusun dan diajukan oleh

ANASTASIA OHOWAY
A062191020

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister **Akuntansi** Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 18 Agustus 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Mediaty, SE., Ak., M.Si., CA.
NIP. 19650925199002001

Pembimbing Pendamping

Dr. Grace T. Pontoh, SE., Ak., M.Si., CA
NIP. 196503201992032002

Ketua Program Studi
Magister Akuntansi

Dr. Aini Indrijawati, SE., M.Si., CA.
NIP. 196811251994122002

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si.
NIP. 196402051988101001



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa, tesis berjudul Pengaruh Pengendalian Internal Dalam Memedisi Sistem Informasi Akuntansi dan Peran Auditor Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pemerintahan Provinsi Papua Barat adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing Prof.Dr. Mediaty,SE.,Ak.,M.Si.,CA dan Dr.Grace T. Pontoh ,SE.,Ak.,M.Si.,CA sebagai pendamping. Karya ilmiah ini belum diajukan dan sedang tidak diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka tesis ini. Sebagian dari tesis ini telah dipublikasikan di jurnal Innovative : Journal of Social Science Research, Volume 3 Halaman 10444-10456 dan DOI: <http://doi.org/10.31004/innovative.v3i3.3041> sebagai artikel dengan judul Pengaruh Pengendalian Internal Dalam Memedisi Sistem Informasi Akuntansi dan Peran Auditor Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pemerintahan Provinsi Papua Barat.

Dengan ini saya menyatakan hak cipta dari karya tulis saya berupa tesis ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar 21 Agustus 2023



NIM A062191020



Optimized using
trial version
www.balesio.com

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan hasil tesis ini. Hasil tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister Akuntansi (M.Ak) pada Program Pendidikan Magister Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya hasil tesis ini. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada Ibu Prof. Dr. Mediaty, SE., Ak., M.Si., CA sebagai pembimbing satu dan Ibu Dr. Grace T. Pontoh, SE., Ak., M.Si., CA sebagai pembimbing dua atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, serta diskusi-diskusi yang telah dilakukan.

Ucapan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada Bapak kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian di Pemerintahan Provinsi Papua Barat. Hal yang sama juga peneliti sampaikan kepada Bapak/Ibu pejabat eselon II, III dan IV di Pemerintahan Provinsi Papua Barat atas kesediaannya mengisi kuesioner serta memberikan informasi-informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Semoga bantuan yang diberikan oleh semua pihak mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Terakhir, Ucapan terima kasih kepada ayah, ibu, suami, kakak, adik, teman, keluarga dan sahabat peneliti atas bantuan, nasihat, dan motivasi yang diberikan selama penelitian hasil tesis ini. Semoga Tuhan senantiasa tercurahkan kepada kita semua dan setiap perjuangan kita mendapat balasan yang terbaik.

Hasil tesis ini masih sangat jauh dari sempurna walaupun telah mendapat bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam hasil tesis ini maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran membangun akan lebih menyempurnakan tesis ini.

Makassar, Agustus 2023

Anastasia Ohoiway



ABSTRAK

Anastasia Ohoiway. Pengaruh Pengendalian Internal Dalam Memediasi Sistem Informasi Akuntansi dan Peran Auditor Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pemerintahan Provinsi Papua Barat (dibimbing oleh Mediaty dan Grace T. Pontoh)

Pencegahan fraud merupakan upaya terintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor yang menyebabkan fraud (fraud triangle) yaitu memperkecil peluang terjadinya kesempatan untuk berbuat kecurangan, menurunkan tekanan kepada pegawai agar ia mampu memenuhi kebutuhannya dan meminimalisasi alasan untuk membuat pembenaran atau rasionalisasi atas tindakan fraud yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengendalian internal dalam memediasi sistem informasi akuntansi dan peran auditor internal terhadap pencegahan fraud. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data menggunakan sumber data primer melalui penyebaran kuesioner sebanyak 32 responden. Responden dalam penelitian ini adalah pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV pada dua satuan kerja Pemerintahan Provinsi Papua Barat. Data analisis menggunakan aplikasi Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud, peran auditor internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud dan Pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud sedangkan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap pencegahan fraud melalui pengendalian internal dan peran auditor internal berpengaruh terhadap pencegahan fraud melalui pengendalian internal.

Kata Kunci : Sistem Informasi Akuntansi, Peran Auditor Internal, Pengendalian Internal, Pencegahan Fraud





Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRAK

Anastasia Ohoiway. The Effect Of Internal Control In Mediation Of Accounting Information Systems And The Role Of Internal Auditors On Fraud Prevention In West Papua Province Government (supervised by Mediaty and Grace T. Pontoh)

Fraud prevention is an integrated effort that can suppress the occurrence of factors that cause fraud (fraud triangle), namely minimizing opportunities for opportunities to commit fraud, reducing pressure on employees so that they are able to meet their needs and minimizing reasons for making justifications or rationalizations for acts of fraud committed. This research aims to analyze the effect of internal control in mediating accounting information systems and the role of internal auditors on fraud prevention. This research uses a quantitative approach. Data collection in this research used primary data sources through distributing questionnaires to 32 respondents. Respondents in this research is echelon II, echelon III and echelon IV on two unit Work Government West Papua Province. Analysis data use Partial Least Square (PLS) application. The research results show that accounting information systems have a significant effect on fraud prevention, the role of internal auditors has a significant effect on fraud prevention and Internal control has a positive and significant effect on fraud prevention while the accounting information system has a significant effect on fraud prevention through internal control and the role of internal auditors has a significant effect on fraud prevention through internal control.

Keywords : System Information Accounting , Role of Internal Auditors, Internal Control , Fraud Prevention .



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PRAKATA	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACK.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Kegunaan Penelitian	6
1.4.1. Kegunaan Teoritis	6
1.4.2. Kegunaan Praktis	6
1.5. Sistematikan Penulisan	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 9
2.1. Tinjauan Teori dan Konsep	9
2.1.1. <i>Theory Atribusi</i>	9
2.1.2. <i>Fraud Triangle Theory</i>	10
2.1.3. Sistem Informasi Akuntansi	12
2.1.4. Peran Auditor Internal	18
2.1.5. Pengendalian Internal	30
2.1.6. Pencegahan <i>Fraud</i>	38
2.2. Tinjauan Empiris	52
 BAB III KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS	 55
3.1. Kerangka Pemikiran	55
3.2. Hipotesis	56
3.2.1. Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i>	56
3.2.2. Pengaruh Peran Auditor Internal Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i>	57
3.2.3. Pengaruh Peran Auditor Internal Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i>	58
3.2.4. Pengaruh Pengendalian Internal Memediasi Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i>	59
3.2.5. Pengaruh Pengendalian Internal Memediasi Peran Auditor Internal Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i>	59
 BAB IV METODE PENELITIAN.....	 61
1. Rancangan Penelitian	61
2. Situs dan Waktu Penelitian	62
3. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel	62
4. Jenis dan Sumber Data	62
5. Metode Pengumpulan Data	63
6. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	63
7. Instrumen Penelitian	66



4.8. Teknik Analisis Data.....	66
BAB V HASIL PENELITIAN	70
5.1. Deskripsi Data.....	70
5.2. Deskripsi Hasil Penelitian.....	78
BAB VI PEMBAHASAN	83
6.1. Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Pencegahan Fraud	83
6.2. Pengaruh Peran Auditor Internal Terhadap Pencegahan Fraud	84
6.3., Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud	85
6.4. Pengaruh Pengendalian Internal Memediasi Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Pencegahan Fraud	86
6.5. Pengaruh Pengendalian Internal Memediasi Peran Auditor Internal Terhadap Pencegahan Fraud	87
BAB VI PENUTUP	88
6.1. Kesimpulan	88
6.2. Implikasi.....	89
6.3. Keterbatasan Penelitian	90
6.4. saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	91



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1 Daftar Instansi dan Jumlah Pejabat Struktural	62
5.1 Distribusi dan Pengembalian Kuesioner.....	70
5.2 Jenis Kelamin Responden	71
5.3 Umur Responden.....	72
5.4 Masa Kerja.....	72
5.5 Tingkat Pendidikan	73
5.6 Rentang Skala Variabel	74
5.7 Rentang Skala Variabel SIA.....	74
5.8 Rentang Skala Variabel Peran Auditor Internal	75
5.9 Rentang Skala Variabel Pencegahan Fraud	76
5.10 Rentang Skala Variabel Mediasi Pengendalian Internal	77
5.11 AVE	77
5.12 Uji Validitas	78
5.13 Uji Reliability	78
5.14 R Square	79
5.15 Hasil Uji Hipotesis	80
5.16 Hasil Uji Hipotesis Variabel Mediasi	81



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pencegahan *fraud* merupakan upaya terintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor yang menyebabkan *fraud* (*fraud triangle*) yaitu Memperkecil peluang terjadinya kesempatan untuk berbuat kecurangan, Menurunkan tekanan kepada pegawai agar ia mampu memenuhi kebutuhannya dan Meminimalisasi alasan untuk membuat pembenaran atau rasionalisasi atas tindakan *fraud* yang dilakukan (Pusdiklatwas BPKP, 2008:37).

Menurut Teori *fraud triangle* yang dikemukakan oleh Cressey pada tahun 1953 mengatakan bahwa orang yang melakukan aktivitas curang akibat interaksi dorongan yang berasal dari dalam kepribadian individu terkait dan dari lingkungan eksternal. Dorongan tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga kategori umum yaitu pertama tekanan dimana seseorang merasa atau memiliki kebutuhan untuk melakukan kecurangan, pengaruh desakan dalam pikiran, dan keinginan inilah yang menjadi kekuatan moral, kedua peluang dimana seseorang percaya adanya kemungkinan untuk melakukan kecurangan dan percaya bahwa kecurangan tersebut tidak terdeteksi oleh orang lain. dan ketiga rasionalisasi dimana seseorang yang telah melakukan kecurangan mencari pembenaran atas perbuatannya, namun alasan tersebut tidak tepat.

Teori *fraud triangle* berkaitan dengan perilaku individu sejalan dengan teori atribusi yang dikemukakan oleh Heider (1958) yang mengatakan bahwa ketika

ervasi perilaku seorang individu, kita berupaya untuk menentukan perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal. Perilaku



internal adalah perilaku yang diyakini dipengaruhi oleh kendali pribadi seorang individu. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal dianggap sebagai akibat dari sebab-sebab luar, yaitu, individu tersebut telah berperilaku demikian yang disebabkan oleh situasi tertentu

Fraud tidak hanya terjadi di sektor organisasi yang berorientasi pada profit saja melainkan sektor pemerintahan pun juga tak luput dari pihak yang melakukan fraud. Terbukti dengan banyaknya fenomena kasus-kasus fraud yang terjadi dari tahun ke tahun, baik dari instansi pemerintahan maupun instansi swasta (seperti perusahaan dan bank swasta).

Fenomena kasus kecurangan (Fraud) terjadi pada Pemerintahan Provinsi Papua Barat yaitu pada tahun 2022 dimana Kejaksaan Tinggi Papua Barat menetapkan mantan bendahara Perum Bulog Teminabuan Sorong Selatan, Martha Mulu, ditetapkan sebagai tersangka dugaan kecurangan dana penjualan beras periode 2011-2019 senilai Rp14,99 miliar. Menurut Kajati Papua Barat, penyalahgunaan dana hasil penjualan beras itu dilakukan selama delapan tahun (2011-2019) di wilayah Sorong Selatan dan Maybrat Papua Barat saat tersangka menjabat sebagai staf administrasi dan keuangan Gudang Beras Bulog (GBB) Wernas kantor cabang Sorong di Teminabuan kabupaten Sorong Selatan. Uang hasil penjualan beras selama delapan tahun senilai Rp14,99 miliar tidak disetor ke kantor Bulog pusat namun dana tersebut diduga digunakan untuk keperluan pribadi tersangka (Kapisa Hans, 2022).

Sejalan dengan kasus tersebut pada tahun 2023 Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat Harli Siregar menetapkan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Papua Barat Frengky K Muguri sebagai tersangka kasus dugaan kecurangan menerima dana Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan p 4,3 miliar pada 2021. Dana tersebut diperuntukkan pada kegiatan



pemeliharaan halaman, pembersihan lahan , belanja bahan pembersih kantor, hingga belanja makan dan minum tamu pimpinan. Perbuatan kecurangan diduga merugikan negara sebesar Rp 500 juta (Nasir Juhra,2023) .

Berdasarkan fenomena tersebut maka, diperlukannya tindakan pencegahan untuk mencegah terjadinya tindakan kecurangan. Pencegahan fraud merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya factor penyebab kecurangan (Eldayanti dkk, 2020).

Dalam mengatasi timbulnya kecurangan, maka sistem informasi akuntansi, peran audit internal dan pengendalian internal sangat diperlukan di dalam perusahaan untuk mengevaluasi sistem dan prosedur yang telah disusun secara benar dan sistematis serta apakah telah diimplementasikan secara benar, melalui pengamatan, penelitian, pemeriksaan dan pengendalian internal atas pelaksanaan tugas yang telah didelegasikan di setiap unit organisasi atau perusahaan.

Sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan dan memproses data sehingga menghasilkan informasi untuk pengambilan keputusan(Romney dan Steinbart ,2006). Beberapa bukti empiris mengenai sistem informasi akuntansi terhadap pencegahan *fraud* dilakukan oleh Ulfa Nita Dewi et al.,(2021) menemukan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* yaitu dengan adanya sistem informasi akuntansi maka informasi yang dihasilkan terstruktur dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya dan kualitasnya sehingga perusahaan menjadi lebih mudah dalam melakukan proses pengendalian dan pengambilan keputusan serta meningkatkan kinerja yang

tar periode sebagai upaya pengendalian dan pengawasan terhadap usahaan.



Penelitian tersebut tak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Reza Syah Pahlevi dan Dwi Ari Pertiwi (2021) hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan fraud, faktor pertama adalah karena sistem informasi akuntansi perusahaan di nilai sedikit rumit meski sebenarnya membantu dalam pengerjaan suatu laporan keuangan bagi para pegawai yang kurang dalam memahami akuntansi. Faktor kedua adalah sistem yang ada hanya dapat dioperasikan dengan menggunakan jaringan yang terdapat di kantor atau tidak dapat diakses di rumah, ini menjadikan para pegawai harus mengerjakan segala sesuatunya di kantor.

Selain sistem informasi akuntansi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya fraud adalah Peran Auditor internal. Hal disebabkan karena peran auditor internal sangat memiliki peran yang besar di dalam perusahaan untuk mengendalikan dan mengevaluasi aktivitas kegiatan perusahaan terutama dalam pencegahan fraud (Aji Ahmad Fachruroji, 2020).

Beberapa bukti empiris mengenai peran auditor internal terhadap pencegahan *fraud* dilakukan oleh Nur Aisyah (2023) hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Auditor Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud. Hal ini disebabkan karena auditor internal sangat memiliki peran yang besar di dalam perusahaan untuk mengendalikan dan mengevaluasi aktivitas kegiatan perusahaan terutama dalam pencegahan fraud.

Penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Oligretia nitsae (2020) Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran auditor internal tidak berpengaruh terhadap kecurangan fraud. Peran auditor internal belum

mengurangi kecurangan adalah bahwa peran dan kemampuan al dari auditor internal belum maksimal dilakukan dalam proses



pemeriksaan untuk dapat mencegah kecurangan.

Hal lain yang juga dianggap berperan penting dalam pencegahan *fraud* yaitu pengendalian internal. *Committee of sponsoring organizations of the treadway commission* (Coso) (2013) menyebutkan bahwa komponen pengendalian internal adalah lingkungan kontrol, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Lima komponen pengendalian internal saling terkait dan timbul dari proses manajemen. Jika satu komponen tidak dilakukan dengan benar, maka seluruh pengendalian internal tidak akan bekerja secara efektif, walaupun empat komponen lainnya efektif.

Beberapa bukti empiris mengenai pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dilakukan oleh Agus Budi Hartono dan Arief Himmawan Dwi Nugroho (2022) hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Maka semakin bagus suatu pengendalian internal perusahaan maupun lembaga, maka semakin meningkat pula pencegahan terhadap sebuah kecurangan yang terjadi dalam sesuatu perusahaan ataupun lembaga dimana sudah ada pengendalian internal yang meningkatkan upaya pencegahan kecurangan (*fraud*)

Semakin baik pengendalian internal yang dimiliki oleh perusahaan maka akan semakin kecil peluang terjadinya kecurangan, karena dengan sistem pengendalian yang baik akan mempersempit seseorang untuk melakukan kecurangan yang salah satunya bentuknya yaitu penggelapan dana (Yoshua Silitonga *et al.*, 2020). Namun penelitian Penelitian mengenai pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dilakukan oleh Oli Gretia Nitsae *et al.*, (2020) menyatakan bahwa Ada atau tidak adanya pengendalian internal, auditor internal

pihak yang ditunjuk untuk mengawasi pemerintah daerah tetap akan
in perannya.



Berdasarkan fenomena dan beberapa penelitian sebelumnya maka, diperlukannya tindakan pencegahan untuk mencegah terjadinya tindakan kecurangan. Pencegahan fraud merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya factor penyebab kecurangan masih terdapat perbedaan terkait hal-hal yang mempengaruhi pencegahan *fraud*. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada variabel dan model yang digunakan. Dalam penelitian ini peneliti tertarik mengambil judul penelitian yaitu “ Pengaruh Pengendalian Internal Dalam Memediasi Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pemerintahan Provinsi Papua Barat “

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Pemerintah Provinsi Papua Barat.
2. Apakah peran auditor internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Pemerintah Provinsi Papua Barat.
3. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Pemerintah Provinsi Papua Barat.
4. Bagaimana pengaruh pengendalian internal dalam memediasi sistem informasi akuntansi terhadap pencegahan fraud pada Pemerintah Provinsi Papua Barat.
5. Bagaimana pengaruh pengendalian internal dalam memediasi peran auditor internal terhadap pencegahan fraud pada Pemerintah Provinsi Papua Barat.



1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan dan menganalisis hal-hal berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap pencegahan *fraud* pada Pemerintah Provinsi Papua Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh peran auditor internal terhadap pencegahan *fraud* pada Pemerintah Provinsi Papua Barat.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pada Pemerintah Provinsi Papua Barat.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengendalian internal dalam memediasi sistem informasi akuntansi terhadap pencegahan *fraud* pada Pemerintah Provinsi Papua Barat.
5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengendalian internal dalam memediasi peran auditor internal terhadap pencegahan *fraud* pada Pemerintah Provinsi Papua Barat.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis kegunaan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Penelitian ini dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pengendalian internal dalam memediasi sistem informasi akuntansi dan peran auditor internal dan terhadap pencegahan *fraud*.
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan informasi, wawasan dan pengetahuan yang dapat digunakan dalam pengembangan ilmu anjut khususnya yang berkaitan dengan pencegahan *fraud*.



3. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut baik yang bersifat melengkapi maupun melanjutkan.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi pembaca yang membutuhkan informasi tentang pencegahan *fraud* dalam sebuah instansi atau perusahaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan pedoman penulisan tesis dan disertasi yang telah ditulis oleh Program Magister dan Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, 2013 yang digunakan untuk lebih memahami masalah dalam penelitian ini

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan terkait judul usulan penelitian ini

Bab II Tinjauan Pustaka, Bab ini menguraikan teori yang menjadi dasar dalam proses meneliti. Peneliti mengkaji berbagai sumber yang berkaitan dengan judul untuk dijadikan sebagai acuan merumuskan hipotesis, kemudian digambarkan dalam kerangka pikir berupa alur penelitian yang akan dilakukan peneliti.

Bab III Kerangka Konseptual dan Hipotesis, Bab ini menguraikan kerangka pemikiran teoretis dan penurunan hipotesis penelitian. Bab ini menjelaskan perumusan hipotesis berdasarkan konsep penurunan logis

Bab IV Metode Penelitian, menguraikan rancangan penelitian, waktu, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber



data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrument penelitian, teknik analisis data dan menjelaskan teknik pengolahan data yang digunakan hingga penggunaan analisis yang digunakan.

Bab V Hasil Penelitian. Bab ini memuat deskripsi data dan deskripsi hasil penelitian.

Bab VI Pembahasan. Bab ini menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah, menafsirkan temuan-temuan, mengintegrasikan hasil dan temuan pada ilmu atau teori yang telah mapan.

Bab VII Penutup. Bab ini memuat kesimpulan, implikasi, keterbatasan penelitian dan saran-saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori Atribusi

2.1.1. Teori Atribusi (*attribution theory*)

Teori atribusi pertama kali dikemukakan oleh Heider (1958). Teori ini digunakan untuk mengembangkan penjelasan tentang cara-cara kita menilai individu secara berbeda, bergantung pada arti yang kita hubungkan dengan perilaku tertentu. Pada dasarnya, teori ini mengemukakan bahwa ketika mengobservasi perilaku seorang individu, kita berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal. Perilaku internal adalah perilaku yang diyakini dipengaruhi oleh kendali pribadi seorang individu. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal dianggap sebagai akibat dari sebab-sebab luar, yaitu, individu tersebut telah berperilaku demikian yang disebabkan oleh situasi tertentu (Stephen dan Timothy, 2008 dalam raya, 2016).

Dalam konteks audit, teori atribusi banyak digunakan peneliti untuk menjelaskan mengenai penilaian (judgment) auditor, penilaian kinerja, dan pembuatan keputusan oleh auditor. Atribusi berhubungan dengan penilaian dan menjelaskan bagaimana seorang auditor berperilaku. Kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan banyak ditentukan oleh atribusi internal, dimana faktor-faktor yang menentukan kemampuan lebih banyak berasal dari dalam diri auditor. Kemampuan dapat dibentuk melalui usaha seseorang misalnya dengan

pengetahuan, mempertahankan independensi, dan meningkatkan etisisme profesional (Karikarini dan Sugiarto, 2016).



2.1.2. Teori Segitiga Kecurangan (*Fraud Triangle Theory*)

Teori tentang *fraud triangle* dikemukakan pertama kali oleh Cressey pada tahun 1953 yang di dalamnya berisi tiga faktor penyebab kecurangan di perusahaan, terutama dalam laporan keuangan. Seorang auditor dituntut mampu menemukan dan menentukan suatu tindakan ilegal dan dilakukan dengan sengaja yang dapat mengakibatkan salah penyajian dalam laporan keuangan perusahaan. Cara mendeteksinya biasanya dengan cara melihat tanda, sinyal atau *red flags* pada suatu tindakan yang diduga dapat berpotensi menimbulkan *fraud*.

Auditor juga berperan dalam mendeteksi *fraud* pada tingkat manajemen dengan memberikan peringatan lebih awal sebelum terjadi kecurangan serta rekomendasi perbaikan pada kelemahan sistem pengendalian *internal*. Rekomendasi dari auditor dapat berupa perbaikan kebijakan dan prosedur untuk mencegah kecurangan sehingga bisa diminimalisir dampak dan risikonya.

Berdasarkan penelitian Cressey (1953 dalam Hall & Singleton, 2007:264), orang yang melakukan aktivitas curang akibat interaksi dorongan yang berasal dari dalam kepribadian individu terkait dan dari lingkungan eksternal. Dorongan ini diklasifikasikan ke dalam tiga kategori umum yaitu:



Sumber: Arens, et al. (2008:375)

Gambar 2.1 Fraud Triangle



a. *Incentive/Pressure* (Tekanan)

Tekanan merupakan situasi dimana seseorang merasa atau memiliki kebutuhan untuk melakukan kecurangan, pengaruh desakan dalam pikiran, dan keinginan inilah yang menjadi kekuatan moral. Tekanan mengacu pada sesuatu yang telah terjadi di kehidupan pribadi pelaku yang menciptakan kebutuhan yang memotivasinya untuk melakukan kecurangan (Arens, et al., 2012:375).

b. *Opportunity* (Peluang)

Peluang merupakan situasi dimana seseorang percaya adanya kemungkinan untuk melakukan kecurangan dan percaya bahwa kecurangan tersebut tidak terdeteksi oleh orang lain. Kecurangan yang disebabkan oleh peluang dapat terjadi karena pengendalian internal yang lemah, manajemen pengawasan yang kurang baik dan penggunaan posisi. Kegagalan dalam menetapkan prosedur yang memadai untuk mendeteksi kecurangan juga meningkatkan kesempatan terjadinya kecurangan (Arens, et al., 2012:375).

c. *Rationalization* (Rasionalisasi)

Rasionalisasi merupakan kondisi dimana seseorang yang telah melakukan kecurangan mencari pembenaran atas perbuatannya, namun alasan tersebut tidak tepat. Rasionalisasi diperlukan agar pelaku dapat mencerna perilakunya yang melawan hukum untuk tetap mempertahankan jati dirinya sebagai orang yang dipercaya. Rasionalisasi merupakan bagian dari *fraud triangle* yang paling sulit untuk diukur. Bagi mereka yang umumnya tidak jujur, akan lebih mudah untuk merasionalisasi penipuan, dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki standar moral yang tinggi (Arens, et al., 2012:375).



2.1.3 Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Romney & Steinbart (2006) Pengertian sistem informasi akuntansi (SIA) adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan juga memproses data menjadi informasi yang berguna dalam membantu proses pengambilan keputusan. Definisi tersebut menggambarkan bahwa formulir-formulir, catatan-catatan, dan prosedur-prosedur serta jenis-jenis alat yang digunakan untuk mengolah data yang berhubungan operasi dari suatu badan usaha yang bertujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan yang diperlukan oleh manajemen untuk mengendalikan operasi perusahaan.

Sistem informasi akuntansi yang baik dalam pelaksanaannya diharapkan akan memberikan atau menghasilkan informasi-informasi yang berkualitas serta akan memberikan manfaat bagi pihak manajemen khususnya pemakai-pemakai informasi lainnya dalam pengambilan keputusan. Fungsi utama sistem informasi akuntansi adalah mendorong seoptimal mungkin agar akuntansi dapat menghasilkan berbagai informasi akuntansi yang berkualitas yaitu informasi yang tepat waktu, relevan, akurat, dapat dipercaya, dan lengkap secara keseluruhan informasi akuntansi tersebut mengandung arti dan berguna.

Dalam memenuhi kebutuhan informasi baik untuk kebutuhan pihak internal maupun pihak eksternal, sistem informasi harus didesain sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsinya. Demikian pula suatu sistem informasi akuntansi dalam memenuhi fungsinya harus mempunyai tujuan-tujuan yang dapat memberikan pedoman kepada manajemen dalam melakukan tugasnya sehingga dapat menghasilkan informasi-informasi yang berguna, terutama dalam

perencanaan dan pengendalian.



Adapun tujuan sistem informasi akuntansi menurut Mulyadi (2008) menyatakan bahwa :

- a. "Menyediakan informasi bagi pengelola kegiatan usaha baru.
- b. Memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh suatu sistem yang sudah ada, baik mengenai suatu, ketepatan penggajian maupun struktur informasinya.
- c. Memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan internal, yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan (*reliability*) informasi akuntansi dan juga untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan terhadap kekayaan perusahaan.
- d. Mengurangi biaya klerikal dalam pemeliharaan catatan akuntansi."

Modal pengukuran keberhasilan sistem informasi yang lain dikemukakan oleh Jogiyanto (2007) , memberikan enam dimensi keberhasilan sistem informasi akuntansi sebagai berikut :

a. *System Quality* (Kualitas Sistem)

System Quality (Kualitas Sistem) Kualitas sistem berarti kualitas dari kombinasi hardware dan software dalam sistem informasi. Fokusnya adalah performa dari sistem yang menunjukkan seberapa baik kemampuan perangkat keras, perangkat lunak, kebijakan, prosedur dari sistem informasi dapat menyediakan informasi kebutuhan.

Indikator pengukuran dari kualitas sistem yaitu :

1. Kenyamanan akses.

Tingkat kesuksesan sistem informasi akuntansi dapat dilihat dari tingkat kenyamanan pengguna dalam menggunakan sistem informasi. Dengan tingginya tingkat kenyamanan suatu sistem informasi maka pengguna akan sering menggunakan sistem informasi untuk mencari informasi yang dibutuhkan.



2. Keluwesan sistem (*flexibility*)

Keluwesan (*flexibility*) sistem informasi sangat mempengaruhi tingkat kesuksesan sistem. Pengguna akan lebih memilih sistem yang lebih fleksibel dibandingkan dengan sistem yang kaku. Dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi maka pengguna dapat menggunakan sistem dengan lebih mudah.

3. Realisasi dari ekspektasi-ekspektasi pemakai

Jika sebuah sistem dapat merealisasikan ekspektasi (harapan) dari pemakaian dalam mencari sebuah informasi maupun penggunaan sistem maka sistem akan lebih diminati.

4. Kegunaan dari fungsi-fungsi spesifik

Setiap sistem informasi dapat dibedakan fungsi-fungsi yang dimilikinya banyak sistem informasi lebih diminati karena memiliki fungsi-fungsi yang lebih spesifik dari sistem informasi lain.

b. *Information Quality* (Kualitas Informasi)

Information quality merupakan output dari pengguna sistem informasi oleh pengguna (*user*). Variabel ini menggambarkan kualitas informasi yang dipersepsikan oleh pengguna yang diukur dengan keakuratan akurasi (*accuracy*), ketepatan waktu (*time liness*), dan penyajian informasi (*format*).

Indikator pengukuran kualitas sistem yaitu :

1. Kelengkapan (*completness*)

suatu informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi dapat dikatakan berkualitas jika informasi yang dihasilkan lengkap. Informasi yang lengkap sangat dibutuhkan oleh pengguna dalam pengambilan keputusan. Informasi yang lengkap ini mencakup seluruh informasi yang



dibutuhkan oleh pengguna dalam menggunakan sistem informasi tersebut secara berkala setelah merasa puas terhadap sistem informasi tersebut.

2. Relevan (*relevance*)

Kualitas informasi suatu sistem informasi dikatakan baik jika relevan terhadap kebutuhan pengguna atau dengan kata lain informasi tersebut mempunyai manfaat untuk penggunanya. Relevansi informasi untuk tiap-tiap pengguna satu dengan yang lainnya berbeda sesuai dengan kebutuhan.

3. Akurat (*accurate*)

Informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi harus akurat karena sangat berpengalaman bagi pengambilan keputusan penggunanya. Informasi yang akurat berarti bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias atau menyesatkan. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksud informasi yang disediakan oleh sistem informasi. Informasi harus akurat karena dari sumber informasi sampai ke penerima informasi kemungkinan banyak terjadi gangguan (*noise*) yang dapat merubah atau merusak informasi tersebut.

4. Ketepatan waktu (*timeliness*)

Informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat, informasi yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi, karena informasi merupakan landasan di dalam pengambilan keputusan. Jika pengambilan keputusan terlambat, maka dapat berakibat fatal untuk organisasi sebagai pengguna suatu sistem informasi tersebut. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kualitas informasi yang dihasilkan sistem informasi baik

a informasi yang dihasilkan tepat waktu.



5. Format

Sistem informasi perusahaan yang memudahkan pengguna untuk memahami informasi yang disediakan oleh sistem informasi mencerminkan kualitas informasi yang baik. Jika penyajian informasi disajikan dalam bentuk yang tepat dalam informasi yang dihasilkan dianggap berkualitas sehingga memudahkan pengguna untuk memahami sistem informasi yang dihasilkan oleh suatu sistem informasi. Format informasi mengacu kepada bagaimana informasi dipresentasikan kepada pengguna.

c. *Service Quality* (Kualitas Pelayanan)

Kualitas layanan sistem informasi merupakan pelayanan yang didapatkan pengguna dari pengembang sistem informasi, layanan dapat berupa update sistem informasi dan respon dari pengembang jika informasi mengalami masalah.

d. *Use* (Penggunaan)

Penggunaan mengacu pada seberapa sering pengguna memakai sistem informasi. Dalam kaitannya dengan hal ini penting untuk membedakan apakah pemakaian termasuk keharusan yang harus dihindari atau sukarela. Variabel ini diukur dengan indikator yang digunakan yang terdiri dari satu item yaitu seberapa sering pengguna (user) menggunakan sistem informasi tersebut (*frekuensi of use*)

e. *User satisfaction* (Kepuasan Pemakai)

Kepuasan pengguna merupakan respon dan umpan balik yang dimunculkan pengguna setelah memakai sistem informasi. Sikap pengguna terhadap informasi merupakan kriteria subjektif mengenai seberapa suka



pengguna terhadap sistem yang digunakan. Variabel ini didukung dengan indikator yang terdiri atas efisiensi, keefektifan, dan kepuasan.

1. Efisiensi Kepuasan pengguna dapat tercapai jika sistem informasi membutuhkan pengguna secara efisiensi.. Suatu sistem informasi dapat dikatakan efisiensi jika suatu tujuan yang dimiliki pengguna dapat tercapai dengan melakukan hal yang tepat.
2. Keefektifan Keefektifan sistem informasi dalam memenuhi kebutuhan pengguna dapat mengakibatkan kepuasan pengguna terhadap sistem informasi tersebut.
3. Kepuasan Kepuasan pengguna dapat diukur melalui rasa puas yang dirasakan pengguna dalam menggunakan sistem informasi perpustakaan. Rasa puas pengguna dapat ditimbulkan dari fitur-fitur yang disediakan sistem.

f. *Net Benefit* (Keuntungan Perusahaan)

Net Benefit (manfaat-manfaat bersih) Manfaat-manfaat bersih merupakan dampak (impact) keberadaan dan pemakaian sistem informasi terhadap kualitas kerja secara individual maupun organisasi termasuk didalamnya produktivitas, meningkatkan pengetahuan dan mengurangi lama waktu pencarian informasi.

Dalam penelitian ini didefinisikan keberhasilan penerapan sistem informasi akuntansi Jogiyanto (2007:14), dimana dimensi keberhasilan sistem informasi akuntansi adalah kualitas sistem (*system quality*), kualitas informasi (*information quality*), kualitas pelayanan (*service quality*), penggunaan (*use*), kepuasan pengguna (*user satisfaction*), dan manfaat-manfaat bersih (*net benefit*).



2.1.4 Peran Auditor Internal

1. Pengertian Audit Internal

Audit internal muncul sebagai teknik guna mengatasi berbagai risiko yang semakin tinggi karena semakin berkembangnya dunia bisnis. Cepatnya perkembangan itu dikarenakan terdapat situasi yang berubah secara dinamis dan tidak dapat diprediksi yang berkaitan dengan era modernisasi, sehingga sumber informasi yang bersifat tradisional serta informal tak mampu lagi memenuhi keinginan manajemen yang memiliki tanggung jawab atas berbagai hal yang tidak dapat diamati.

Audit internal merupakan tahap pemeriksaan yang pengelolaannya dilaksanakan dengan netral di lingkungan perusahaan serta berbagai informasi dan laporan keuangan organisasi dalam melakukan pengujian dan evaluasi terhadap aktivitas yang dijalankan.

Pengecekan secara internal merupakan tahap yang dilaksanakan oleh seorang auditor internal suatu organisasi, mengecek aktivitas keuangan, laporan aktivitas, serta taat pada perintah manajemen utama serta taat pada aturan pemerintah dan prosedur dari himpunan para pekerja.

Pemeriksaan intern dilaksanakan seseorang dari dalam organisasi yang bersangkutan, disebut dengan auditor internal. Hadirnya profesi auditor internal dalam suatu organisasi dapat memberi bantuan pada perusahaan untuk memperoleh tujuannya dengan metode pendekatan yang sistematis agar dapat mengevaluasi serta meningkatkan efektivitas terhadap manajemen risiko, pengendalian dan proses dalam penataan kelola organisasi.



Di bawah ini terdapat berbagai pengertian pemeriksaan secara internal, diantaranya:

Audit internal menurut IIA (*Institute of Internal auditor*) yang dikutip oleh Boynton et, al. (2001:980) merumuskan definisi internal audit sebagai berikut:

“Internal Auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization's operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes”.

Internal audit adalah aktivitas independen, keyakinan obyektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Audit tersebut membantu organisasi mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko, kecukupan pengelolaan serta mengontrol aktivitas .

Terdapat kata kunci yang membangun definisi tersebut adalah: aktivitas independen, keyakinan obyektif, konsultasi, memberikan nilai tambah, pendekatan yang sistematis dan berdisiplin, proses pengelolaan risiko, kecukupan pengendalian serta proses tata kelola.

-Sedangkan Sawyer's (2003:10) dalam Moh. Wahyudin Zarkasyi (2008:25) mendefinisikan audit internal sebagai berikut : *“Internal auditing is systematic, objective appraisal by internal auditors of the diverse operation and controls within an organization to determine whether:*

- 1. financial and operating informations is accurate and reliable;*
- 2. risks to the enterprise are identified and minimized;*
- 3. external regulation and acceptable internal policies and procedures are*



ed;

actory operating criteria are met;

5. *resources are used efficiently and economically; and*
6. *the organization's objectives are effectively achieved- all for the purpose of consulting with management and for assisting members all for the organization in the effective discharge of their governance responsibilities".*

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa audit internal adalah sebuah penilaian sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah:

1. Informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan;
2. Risiko yang dihadapi oleh perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi;
3. Peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti;

Sawyer (2009), audit internal merupakan kegiatan berkonsultasi dengan keyakinan yang objektif, kemudian diolah secara netral serta diberi arahan berdasarkan pertambahan *value* dalam memaksimalkan aktivitas organisasi.

Tugiman (2014), pemeriksaan secara internal yaitu berfungsi dalam menilai hasil yang netral di dalam perusahaan serta melakukan pengujian dan evaluasi berbagai agenda perusahaan yang dijalankan.

Agoes (2014), audit internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku

Menurut Hery (2017), audit internal adalah suatu fungsi penelitian yang dikembangkan secara bebas dalam organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan sebagai wujud pelayanan terhadap organisasi perusahaan.



Menurut Sukrisno Agoes (2012:204) definisi dari audit internal adalah sebagai berikut : “Internal audit (pemeriksaan intern) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku. Peraturan pemerintah misalnya peraturan di bidang perpajakan, pasar modal, lingkungan hidup, perbankan, perindustrian, investasi, dan lain- lain”.

Berdasarkan berbagai definisi di atas, bisa disimpulkan audit internal merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam menjamin organisasi/perusahaan mencapai tujuan dan sasarannya. Kegiatan ini dirancang dalam memberi suatu nilai tambah (value added) untuk meningkatkan kualitas dan operasional suatu organisasi.

Audit internal mencakup aktivitas dalam melakukan konsultasi kepada pihak manajemen yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Konsultasi dilakukan berdasarkan hasil di lapangan dan analisis atas berbagai aktivitas operasional yang objektif dalam bentuk hasil serta rekomendasi maupun saran yang diperuntukkan bagi kebutuhan organisasi.

Audit internal merupakan suatu fungsi penilaian yang bebas dalam suatu organisasi untuk mempelajari dan menilai berbagai kegiatan perusahaan sebagai dasar dalam memberikan masukan kepada atasan. Pemeriksa internal mempunyai fungsi utama, ialah menilai sudah sampai dimana prosedur serta kebijakan yang disusun manajer dapat dijalankan, menilai layak atau tidak dalam melindungi aset organisasi, memilih tingkat efektivitas berdasarkan jenis

serta menilai penyampaian yang diperoleh dari seluruh bidang dalam an.



Berdasarkan definisi di atas, terlihat jelas bahwa pemeriksaan intern bertujuan dalam membantu semua tingkatan manajemen untuk bertanggungjawab terhadap seluruh aktivitas yang diberikan terlaksana dengan baik.

2. Tujuan, Fungsi dan Ruang Lingkup

Seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan punya maksud yang tepat berkaitan untuk memotivasi yang mendasari hingga aktivitas tersebut dijalankan, termasuk melaksanakan kegiatan audit internal.

Akmal (2006, 5), pengauditan secara intern bertujuan untuk memberi tambahan penilaian dan memberi arahan terhadap kegiatan operasional. Pengauditan secara intern dilakukan untuk memberi bantuan kepada perusahaan dalam mencapai tujuan akhir dengan metode yang tersusun serta efektif dalam melakukan evaluasi serta memperbaiki dari ketepatan manajer risiko, mengontrol tahap yang jujur dan amanah.

Dalam memperoleh tujuan itu, audit internal menjalankan berbagai kegiatan berikut:

- 1) Memantau ketepatan dan tercukupinya kontrol manajer, termasuk kontrol manajer dalam mengolah laporan berbasis elektrik (PDE).
 - 2) Melakukan identifikasi terhadap risiko yang dapat terjadi.
 - 3) Menilai kesesuaian perencanaan berdasarkan prosedur serta peraturan undang-undang.
 - 4) Mengetahui adanya tanggung jawab dan perlindungan aset.
 - 5) Menilai berbagai laporan yang dapat diandalkan.
 - 6) Menentukan pemanfaatan sumber daya sudah ekonomis dan efisien, serta h tujuan dari organisasi telah dicapai.
- egah dan mendeteksi kecurangan.



8) Memberi ruang untuk berkonsultasi.

Sawyer (2009), pengauditan secara internal berfungsi untuk memberi penilaian terhadap seluruh aspek dalam perusahaan, untuk memperoleh dan memantau operasional perusahaan dengan menyampaikan tanggapan kepada para manajer. Yang bertujuan dalam membantu seluruh tingkat manajer untuk melaksanakan masing-masing perannya dengan baik.

Di bawah ini merupakan fungsi audit internal:

1. Meyakinkan pelaksanaan yang sesuai kebijakan perencanaan serta prosedur yang telah ditetapkan.
2. Dapat meyakinkan bahwa kekayaan perusahaan dapat dipertanggungjawabkan dan dijaga dengan aman dari berbagai kemungkinan risiko yang terjadi.
3. Meningkatkan kepercayaan akuntansi serta aktivitas lainnya yang akan dikembangkan organisasi.
4. Memberi penilaian terhadap kualitas tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan.

Audit internal berfungsi sebagai alat bagi manajemen dalam membantu memberi penilaian yang efektif dan efisien bagi kelancaran kegiatan dalam mengontrol internal organisasi serta memberi tanggapan dan memperoleh nilai tambahan untuk manajer sebagai acuan untuk membuat kebijakan maupun tindakan berikutnya.

Mulyadi (2010:211) terdapat beberapa penjelasan fungsi audit internal, yaitu:

- a. Fungsi audit internal bertugas melakukan penyelidikan serta menilai pengendalian internal dan efisiensi pelaksanaan fungsi sebagai tugas sasi. Dengan demikian fungsi audit internal merupakan bentuk



pengendalian yang fungsinya adalah untuk mengukur dan menilai efektivitas dari unsur-unsur pengendalian internal yang lain.

- b. Audit internal berfungsi sebagai aktivitas menilai secara luas dalam lingkup organisasi, yang dilaksanakan dengan mulai mengecek keuangan, dan agenda lain, untuk membuka kesempatan kepada pimpinan dalam menjalankan tanggungjawabnya.

Mulyadi (2010:212), dalam melakukan pengecekan secara internal terdapat ruang lingkup memberi penilaian terhadap keefektifan pengelolaan dalam mengendalikan internal milik organisasi, serta kualitas dalam melaksanakan tanggung jawab yang diberikan, dalam pemeriksaan internal harus memperhatikan hal-hal berikut:

1. Mengevaluasi kehandalan (konsistensi)
2. Mengevaluasi seluruh rangkaian struktur yang dipatenkan
3. Mengevaluasi seluruh metode yang digunakan
4. Mengevaluasi seluruh program dan operasi

Di bawah ini merupakan penjelasan dari ruang lingkup audit internal:

1. Mengevaluasi kehandalan (konsistensi) informasi finansial dan operasi serta cara yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklarifikasi dan melaporkan informasi tersebut.
2. Mengevaluasi seluruh rangkaian struktur yang diaudit serta disesuaikan berdasarkan sistem hukum, perencanaan, aturan, dan prosedur yang menjadi bagian penting di dalam organisasi, kemudian menilai suatu organisasi tersebut apakah sudah menjalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.



3. Mengevaluasi seluruh metode yang digunakan dalam upaya melindungi harta dan jika diperlukan, harus melakukan verifikasi terhadap harta-harta tersebut.
4. Memanfaatkan nilai ekonomis dan efisiensi dalam menggunakan berbagai sumber daya.
5. Mengevaluasi seluruh kegiatan operasional atau program yang akan menghasilkan nilai yang konsisten dengan tujuan dan sarana yang telah ditetapkan sebelumnya dan program tersebut telah dijalankan sesuai rencana.

Terdapat beberapa penjelasan ruang lingkup audit internal, yaitu:

1. Mencari tahu reliabilitas dan integritas informasi keuangan dan operasi serta perangkat yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi serta melaporkan informasi semacam itu.
2. Mengevaluasi sistem yang diterapkan dalam memastikan ketaatan terhadap kebijakan, perencanaan, prosedur, hukum dan peraturan yang dapat memiliki pengaruh signifikan terhadap operasi dan laporan serta menentukan apakah organisasi telah mematuhi.
3. Mengevaluasi berbagai program dalam melindungi aktiva dan verifikasi yang tepat tentang keberadaan aktiva tersebut.
4. Menilai tingkat ekonomis dan efisiensi sumber daya yang digunakan.
5. Mengevaluasi informasi atau perangkat dalam memastikan apakah hasilnya konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta apakah operasi atau program itu telah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan

1. Wewenang dan Tanggung Jawab Auditor Internal



dan Akuntan Indonesia (IAI) menjelaskan lebih rinci mengenai tanggung jawab auditor internal dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)

(2001:322) auditor internal bertanggungjawab dalam menyediakan layanan analisis dan evaluasi, meyakinkan, merekomendasikan dan memberi informasi pada manajemen entitas dan dewan komisaris atau pihak lain yang berwenang dengan tanggungjawab tersebut. Auditor internal mempertahankan objektivitasnya yang berkaitan dengan aktivitas yang diauditnya.

2. Peran & Posisi Auditor Internal

Posisi auditor internal dalam struktur organisasi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dalam melaksanakan tugas. Dengan posisi tersebut memungkinkan auditor internal dapat melaksanakan perannya dengan baik serta mampu bekerja secara objektif dan netral. Penetapan bagian auditor internal dalam struktur organisasi disertai dengan *job description* yang jelas tentu dapat memberi dampak positif dalam tahap berkomunikasi antara auditor internal bersama CEO perusahaan atau jajaran manajemen. Sebaliknya, penempatan yang tidak tepat tentu dapat menghambat arus proses laporan dari auditor internal, maka dari itu perlu menentukan dengan jelas posisi dari seorang auditor internal.

Agoes (2004:243-246), terdapat 4 posisi pilihan seorang auditor pada tingkatan perusahaan:

- a. *Internl audiort* yang ada dalam naungan *financial manager* (keuangan),
- b. *Menjadi* staf bagi pimpinan perusahaan, *Menjadi* bagian dari dewan komisaris, serta dipimpin internal audit director.

3. Standarisasi Auditor Internal Profesional

Dalam menciptakan penilaian audit yang tepat, maka diperlukan seorang ang bekerja secara telaten dan berpengalaman, untuk mencapainya utuhkan kriteria yang tepat.



The Institute of Internal Auditors (2017:4) standar sebagai sesuatu yang penting untuk memenuhi kebutuhan auditor serta aktivitasnya. *The Institute of Internal Auditors* (2017:25) menyatakan, standard bagi auditor internal bertujuan untuk: 1. *“Guide adherence with the mandatory elements of the International Professional Practices Framework. 2. Provide a framework for performing and promoting a broad range of valueadded internal auditing services. 3. Establish the basis for the evaluation of internal audit performance. 4. Foster improved organizational processes and operations.”*

Dari pemaparan tersebut, terdapat beberapa tujuan dari penerapan criteria auditor profesional , yaitu:

1. Memberi arahan dalam memenuhi standar wajib sebagai rangkaian praktek profesional taraf internasional.
2. Memberi gambaran untuk melakukan segala jenis pelayanan pengauditan internal yang memiliki nilai pendukung.
3. Menentukan dasar dalam melakukan evaluasi kinerja auditor.
4. Memberi dorongan terhadap peningkatan serta kegiatan perusahaan.

The Institute of Internal Auditors (2017:25) standar pada profesional auditor meliputi rangkaian prinsip dan syarat wajib (mandatory) yang terdiri dari: 1) *“Statements of core requirements for the professional practice of internal auditing and for evaluating the effectiveness of performance that are internationally applicable at organizational and individual levels. 2) Interpretations clarifying terms or concepts within the Standards.”*

Terdapat persyaratan dalam criteria professional internasional, diantaranya:

1. Kriteria, disertai etika, yang termasuk kriteria wajib (mandatory) dari rangkaian < Profesional Internasional, apabila telah sesuai dengan Kode Etik dan



Standar berarti menunjukkan kesesuaian terhadap seluruh unsur wajib (mandatory) dalam Kerangka Praktik Profesional Internasional,

2. Kriteria digunakan untuk dapat memahami dan mengimplementasikan prosedur dengan tepat.

Selanjutnya, kriteria memakai penekanan “harus” dalam persyaratan yang dilakukan, serta kata “semestinya”, sebagai penyesuaian yang baik. The Institute of Internal Auditors (2017:25) menyebutkan bahwa: “The Standards *comprise two main categories: Attribute and Performance Standards*.”

Dari pemaparan tersebut, kriteria auditor internal yang profesional terbagi menjadi 2 standar:

1. Standar Atribut

- a) Wewenang, sasaran, dan pertanggung jawaban auditor internal dipaparkan secara resmi dalam laporan auditor, serta sesuai tugas auditor internal dan hal-hal yang harus diperhatikan pada Kerangka Praktik Profesional Internasional (Prinsip Pokok audit internal, Etika, kriteria audit internal). Kepala audit internal (KAI) selalu mengevaluasi secara berkala laporan audit dan disampaikan pada manajer untuk dapat disetujui.
- b) Kenetralan Perusahaan, Kepala audit internal memiliki tanggungjawab pada tingkatan manajemen yang memungkinkan agenda seluruh auditor mampu menjalankan tugasnya. Kepala audit internal wajib memberi laporan kepada jajaran manajerial selama 1 kali dalam 1 tahun.
- c) Objektif pengauditan internal mempunyai sikap netral yang tidak berpihak, yang selalu menjauhkan diri dari pertentangan yang dapat terjadi.
- d) Auditor mampu melakukan kecakapan ilmu, terampil, dan kemampuan nya yang dapat digunakan untuk menjalankan peran dan tanggungjawabnya. Kegiatan pengauditan internal harus bekerja sama,



memiliki ilmu yang luas, terampil, dan kemampuan lainnya yang dapat bermanfaat.

- e) Auditor internal mampu mencermati serta ahli di bidangnya, seperti harapan seorang auditor yang berhati-hati dan berkompeten.
- f) Perkembangan lanjutan Auditor profesional harus menambah ilmu, meningkatkan keterampilan dan kemampuannya melalui pelatihan profesional yang kontinu.

Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal dalam Standar Profesi Audit Internal (2004) menjelaskan bahwa auditor internal mempunyai peran untuk mengevaluasi dan memberikan kontribusi terhadap perbaikan sistem manajemen resiko, control dan governance. Dalam menjalankan perannya sebagai konsultan, auditor internal dapat membantu organisasi melakukan identifikasi, evaluasi dan implementasi proses pengelolaan resiko. Peran auditor internal diukur dengan 4 indikator, yaitu:

- (a) Integritas
- (b) Objektivitas
- (c) Kerahasiaan
- (d) Kompetensi.

2.1.5. Pengendalian Internal

Menurut Coso (2013) pengendalian internal adalah *"Internal control is a process, effected by an entity's board of directors, management, and other personnel, designed to providen reasonable assurance regarding the achievement of objectives relating to operations, reporting, and compliance*

(pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi dewan direksi, en dan personil lainnya, pada suatu entitas, didesain untuk akan penjaminan yang bertanggung jawab mengenai pencapaian



tujuan hubungannya dengan operasional, laporan dan pencapaian tujuan).

Menurut Coso (2013) dalam *Internal Control-Integrated framework (ICF)* komponen pengendalian intern sebagai berikut:

- a. *Internal control consist of five integrated components:*
- b. *Control Environment*
- c. *Risk Assesment*
- d. *Control Activities*
- e. *Information and Communication*
- f. *Monitoring Activities*

1. Lingkungan Pengendalian (*Controll Environment*)

Lingkungan pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran personal organisasi tentang pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua komponen pengendalian intern yang membentuk disiplin dan struktur.

Coso (2013) menjelaskan mengenai komponen lingkungan pengendalian (*Control Environment*) sebagai berikut:

Lingkungan pengendalian didefinisikan sebagai seperangkat standar, proses, dan struktur yang memberikan dasar untuk melaksanakan pengendalian internal di seluruh organisasi. Lingkungan pengendalian terdiri dari:

- a. Integritas dan nilai etika organisasi;
- b. Parameter-parameter pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi dalam mengelola organisasinya;
- c. Struktur organisasi, tugas, wewenang dan tanggung jawab;
- d. Proses untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang



- e. Ketegasan mengenai tolak ukur kinerja, insentif, dan penghargaan untuk mendorong akuntabilitas kinerja.

Lingkungan pengendalian yang dihasilkan memiliki dampak yang luas pada sistem secara keseluruhan pengendalian internal. Selanjutnya, Coso (2013) berpendapat bahwa terdapat 5 (lima) prinsip yang harus ditegakan atau dijalankan dalam organisasi untuk mendukung lingkungan pengendalian, yaitu:

- 1) *The organization demonstrates a commitment to integrity and ethical values.*
(Organisasi yang terdiri dari dewan direksi, manajemen, dan personil lainnya menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika)
- 2) *The boards of directors demonstrates independence from management and exercises oversight the development and performance of internal control*
(Dewan direksi menunjukkan independensi dari manajemen dan dalam mengawasi pengembangan dan kinerja pengendalian internal)
- 3) *Management establishes, with board oversight, structures, reporting lines, and appropriate authorities and responsibilities in the pursuit of objectives*
(Manajemen dengan pengawasan dewan direksi menetapkan struktur, jalur-jalur pelaporan, wewenang-wewenang dan tanggung jawab dalam mengejar tujuan)
- 4) *The organization demonstrates a commitment to attract, develop, and retain competent individuals in alignment with objectives* (Organisasi menunjukkan komitmen untuk menarik, mengembangkan dan mempertahankan individu yang kompeten sejalan dengan tujuan).
- 5) *The organization holds individuals accountable for their internal control responsibilities in the pursuit of objectives* (Organisasi meyakinkan individu bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawab pengendalian internal dalam mengejar tujuan).



2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Coso (2013) menjelaskan mengenai komponen penilaian risiki (*risk assesment*) sebagai berikut:

Penilaian risiko melibatkan proses yang dinamis dan interaktif untuk mengidentifikasi dan menilai risiko terhadap pencapaian tujuan. Risiko itu sendiri dipahami sebagai suatu kemungkinan bahwa suatu peristiwa akan terjadi dan mempengaruhi pencapaian tujuan entitas, dan risiko terhadap pencapaian seluruh tujuan dari entitas di anggap relatif terhadap toleransi risiko yang ditetapkan. Oleh karena itu, penilaian risiko harus dikelola oleh organisasi.

Selanjutnya, Coso (2013:7) menjelaskan mengenai prinsip-prinsip yang mendukung penilaian risiko sebagai berikut:

- a. *The organization specifies objectives with sufficient clarity to enable the identification and assessment of risk relating to objectives.*(Organisasi menentukan tujuan dengan kejelasan yang cukup untuk memungkinkan identifikasi dan penialain risiko yang berkaitan dengan tujuan)
- b. *The organization identifies risk to the achievement of its objectives across the entity and analyzes risk as a basis for determining how the risks should be managed* (Organisasi mengidentifikasi risiko terhadap pencapaian tujuan di seluruh entitas dan analis risiko sebagai dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola)
- c. *The organization considers the potential for fraud in assessing risks to the achievement of objectives* (Organisasi memepertimbangkan potensi penipuan dalam menilai risiko terhadap pencapaian tujuan).
- d. *The organization identifies and assesse changes that could significantly t the system of internal control* (Organisasi mengidentifikasi dan menilai



perubahan yang signifikan dapat mempengaruhi sistem pengendalian internal).

3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Coso (2013) menjelaskan mengenai aktivitas pengendalian (*control activities*) yaitu Aktivitas pengendalian adalah tindakan- tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian tujuan dilakukan. Aktivitas pengendalian dilakukan pada semua tingkat entitas, pada berbagai tahap dalam proses bisnis, dan atas lingkungan teknologi.

Aktivitas pengendalian memiliki berbagai macam tujuan dan diterapkan dalam berbagai tindakan dan fungsi organisasi. Aktivitas pengendalian meliputi kegiatan yang berbeda seperti otoritas, verifikasi, rekonsiliasi, analisis, presentasi kerja, menjaga keamanan harta perusahaan dan pemisahan fungsi.

Coso (2013:7) menegaskan mengenai prinsip-prinsip dalam organisasi yang mendukung aktivitas pengendalian, yaitu sebagai berikut:

- 1) *The organization selects and develops control activities that contribute to the mitigation of risks to the achievement of objectives to acceptable levels* (Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang berkontribusi terhadap mitigasi risiko pencapaian sasaran pada tingkat yang dapat diterima)
- a. *The organization selects and develops general control activities over technology to support the achievement of objectives* (Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian umum atas teknologi untuk

dukung tercapainya tujuan).



b. The organization deploys control activities through policies that establish what is expected and procedures that put policies into action (Organisasi menyebarkan aktivitas pengendalian melalui kebijakan- kebijakan yang menetapkan apa yang diharapkan, dan prosedur- prosedur yang menempatkan kebijakan-kebijakan ke dalam tindakan).

4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Coso (2013:5) menjelaskan mengenai komponen informasi dan komunikasi (*Information and Communication*) dalam pengendalian internal sebagai berikut:

informasi sangat penting bagi setiap entitas untuk melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal guna mendukung pencapaian tujuan-tujuannya. Informasi yang diperlukan manajemen adalah informasi yang relevan dan berkualitas baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal dan informasi digunakan untuk mendukung fungsi komponen-komponen lain dari pengendalian internal. Informasi diperoleh ataupun dihasilkan melalui proses komunikasi antar pihak internal maupun eksternal yang dilakukan secara terus-menerus, berulang, dan berbagi. Kebanyakan organisasi membangun suatu sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi yang andal, relevan, dan tepat waktu.

Coso (2013) selanjutnya menegaskan mengenai prinsip-prinsip dalam organisasi yang mendukung komponen informasi dan komunikasi yaitu sebagai berikut:

a. Organisasi memperoleh atau menghasilkan dan menggunakan informasi yang berkualitas dan yang relevan untuk mendukung pengendalian internal.



- b. Organisasi secara internal mengkomunikasikan informasi, termasuk tujuan dan tanggung jawab untuk pengendalian internal dalam rangka mendukung fungsi pengendalian internal.
- c. Organisasi berkomunikasi dengan pihak eksternal mengenai hal-hal yang mempengaruhi fungsi pengendalian internal.

5). Aktivitas Pemantauan (Monitoring Activities)

Menurut Coso (2013) aktivitas pemantauan merupakan kegiatan evaluasi dengan beberapa bentuk apakah yang sifatnya berkelanjutan, terpisah ataupun kombinasi keduanya yang digunakan untuk memastikan apakah masing-masing dari lima komponen pengendalian internal mempengaruhi prinsip-prinsip dalam setiap komponen, ada dan berfungsi. Evaluasi terpisah dilakukan secara periodik, akan bervariasi dalam lingkup dan frekuensi tergantung pada penilaian risiko, efektivitas evaluasi yang sedang berlangsung, dan pertimbangan manajemen lainnya. Temuan-temuan dievaluasi terhadap kriteria yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan, lembaga-lembaga pembuat standar yang diakui atau manajemen dan dewan direksi, dan kekurangan-kekurangan yang dikomunikasikan kepada manajemen dan dewan direksi.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa pemantauan dilakukan untuk memberikan keyakinan apakah pengendalian intern telah dilakukan secara memadai atau tidak. Dari hasil pemantauan tersebut dapat ditemukan kelemahan dan kekurangan pengendalian sehingga dapat diusulkan pengendalian yang lebih baik lagi. Pelaksanaan struktur pengendalian intern yang efisien dan efektif haruslah mencerminkan keadaan yang ideal. Namun dalam kenyataannya hal ini sulit untuk dicapai, karena dalam pelaksanaannya struktur pengendalian intern

yai ketrbatasan-keterbatasan.



Menurut Coso (2013:9) keterbatasan-keterbatasan pengendalian internal sebagaimana yang dirumuskan dalam *Internal Control Integrated Framework* sebagai berikut:

“The Framework recognizes the while internal control provides reasonable assurance of achieving the entity’s objectives, limitations do exist. Internal control cannot prevent bad judgment or decisions, or external events that can cause an organization to fail to achieve its operational goals. In other words, even an effective system of internal control can experience a failure. Limitations may results from the:

- a. Suitability of objectives established as a precondition to internal control.*
- b. Reality that human judgment in decision making can be faulty and subject to bias.*
- c. Breakdowns that can occur because of human failures such as simple errors.*
- d. Ability of management to override internal control.*
- e. Ability of management, other personnel and/or third parties to circumvent controls through collusion.*
- f. External events beyond the organization’s control.”*

Definisi diatas menjelaskan bahwa pengendalian internal tidak bisa mencegah penilaian buruk atau keputusan, atau kejadian eksternal yang dapat menyebabkan sebuah organisasi gagal untuk mencapai tujuan operasionalnya. Dengan kata lain, bahkan sistem pengendalian intern yang efektif dapat mengalami kegagalan.

Lebih lanjut dikemukakan bahwa keterbatasan-keterbatasan yang ada mungkin terjadi sebagai hasil dari penetapan tujuan-tujuan yang menjadi prasyarat untuk pengendalian internal tidak tepat, penilaian manusia dalam pengambilan keputusan yang dapat salah dan bias, faktor kesalahan/kegagalan manusia sebagai pelaksana, kemampuan manajemen untuk mengesampingkan alian internal, kemampuan manajemen, personel lainnya, ataupun pihak



ketiga untuk menghindari kolusi, dan juga peristiwa-peristiwa eksternal yang berada di luar kendali organisasi.

2.1.6. Pencegahan *Fraud*

2.1.6.1. Pengertian Pencegahan *fraud*

Pencegahan *fraud* merupakan upaya terintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor yang menyebabkan *fraud* (*fraud triangle*) yaitu Memperkecil peluang terjadinya kesempatan untuk berbuat kecurangan, Menurunkan tekanan kepada pegawai agar ia mampu memenuhi kebutuhannya dan Meminimalisasi alasan untuk membuat pembenaran atau rasionalisasi atas tindakan *fraud* yang dilakukan (Pusdiklatwas BPKP,2008:37)

Fraud merupakan masalah dalam perusahaan dan harus di cegah sedini mungkin, dengan adanya upaya pencegahan yang diterapkan oleh perusahaan dapat memperkecil peluang terjadinya *fraud* karena setiap tindakan *fraud* dapat terdeteksi cepat dan diantisipasi dengan baik oleh perusahaan. Setiap karyawan tidak merasa tertekan lagi dan melakukan pembenaran terhadap tindakan *fraud* yang dapat merugikan banyak pihak.

Kode etik yang diterapkan dengan benar merupakan salah satu mekanisme komunikasi terpenting untuk karyawan standar yang dapat diterima dalam aktivitas mereka dan untuk menarik perhatian pada komitmen manajemen melakukan untuk menghormati integritas entitas (struktur organisasi yang jelas, perumusan kebijakan tentang konflik kepentingan, keberadaan departemen audit internal). Selain itu, program komunikasi dan pelatihan yang direncanakan dengan hati-hati akan meningkatkan karyawan memahami

dan mereka mengenai kontrol yang dilakukan terhadap penipuan dan



pelanggaran profesional (untuk misalnya, diskusi rutin tentang etika profesional atau menyiapkan hotline untuk pelaporan penipuan).

Metode lain untuk pencegahan dan deteksi penipuan mengacu pada mengenali tanda-tanda peringatan dini dari suatu kemungkinan penipuan. Manajemen suatu entitas harus memperhatikan tanda-tanda peringatan berbeda yang muncul: perubahan dalam suatu perilaku karyawan, perubahan gaya hidup seseorang, kecanduan narkoba / alkohol atau judi, perbedaan yang diambil pergi, dll. Dalam hal ini, manajemen dapat mengatur sistem pendukung rahasia untuk karyawannya yang dapat mencakup konseling keluarga, konseling dan bantuan kecanduan, atau konseling keuangan.

Tindakan penting dalam pencegahan dan deteksi kecurangan adalah pembentukan kontrol internal yang tepat sistem bertugas persis dengan tanggung jawab ini. Ini harus bertujuan untuk: menghormati prinsip fungsi pemisahan (no fungsi harus memungkinkan karyawan untuk melaksanakan seluruh siklus transaksi, yaitu karyawan tidak boleh memiliki wewenang untuk melakukan kegiatan front office dan back office); memeriksa staf pada kualifikasi mereka, kompetensi, pendidikan, pekerjaan sebelumnya, evaluasi berkala atas kinerja mereka, cuti; mengakses public sumber daya untuk membandingkan data akuntansi dengan keberadaan fisik mereka; selidiki karyawan dengan benar dan ketiga pihak, terutama dalam kasus posisi otoritas dalam proses pelaporan keuangan.

Menurut *Association of Certified Fraud Examiner (ACFE)* dalam *Fraud Examiners Manual 2006* yang dikutip oleh karyono (2013:3) definisi *fraud* adalah:

"fraud is intentional untruth or dishonest scheme used to take deliberate an 'vantage of another person or group of person it included any mean, ats another"



Definisi yang dijelaskan oleh *Association of Certified Fraud Examiner* (ACFE) tersebut menjelaskan bahwa *fraud* (kecurangan) berkenaan dengan adanya keuntungan yang diperoleh seseorang dengan menghadirkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Di dalam termasuk unsur-unsur *surprise*/tak terduga, tipu daya, licik dan tidak jujur yang merugikan orang lain.

Pencegahan *fraud* menurut Pusdiklatwas BPKP (2008:37) merupakan upaya terintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab *fraud* (*fraud triangle*) yaitu:

- 1) Memperkecil peluang terjadinya kesempatan untuk berbuat kecurangan.
- 2) Menurunkan tekanan kepada pegawai agar ia mampu memenuhi kebutuhannya.
- 3) Meminimalisasi alasan untuk membuat pembenaran atau rasionalisasi atas tindakan *fraud* yang dilakukan.

2.1.6.2. Faktor-Faktor Penyebab Fraud

Karyono (2013) terdapat beberapa teori tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab dari fraud yaitu:

- a. Teori $C = N + K$
- b. Teori Segitiga Fraud (*Fraud Triangle Theory*)
- c. Teori *GONE*
- d. Teori Monopoli (*Klinggard Theory*)

Adapun penjelasan dari teori-teori tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Teori $C = N + K$

Teori ini dikenal di jajaran kepolisian yang menyatakan bahwa criminal (C) dengan niat (N) dan kesempatan (K). Teori ini sangat sederhana dan ing karena meskipun ada niat melakukan fraud, bila tidak ada



kesempatan tidak akan terjadi, demikian pula sebaliknya. Kesempatan ada pada orang atau kelompok orang yang memiliki kewenangan otoritas dan akses atas objek fraud. Nilai perbuatan ditentukan oleh moral dan integritas.

2) Teori Segitiga Fraud (*Fraud Triangle Theory*)

Dalam teori ini perilaku fraud (kecurangan) didukung oleh tiga unsur yaitu adanya tekanan, kesempatan dan pembenaran.

a. Tekanan (*Pressure*)

Dorongan untuk melakukan fraud terjadi pada karyawan (employee fraud) dan oleh manajer (management fraud) dan dorongan itu terjadi antara lain karena tekanan keuangan, kebiasaan buruk, tekanan lingkungan dan tekanan lainnya seperti tekanan dari istri/suami untuk memiliki barang-barang mewah.

b. Kesempatan (*Opportunity*)

Kesempatan timbul karena lemahnya pengendalian internal dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. Kesempatan juga dapat terjadi karena lemahnya pengendalian internal dan ketidakmampuan untuk menilai kualitas kinerja.

c. Pembenaran (*Rationalization*)

Pelaku kecurangan mencari pembenaran ketika pelaku menganggap bahwa yang dilakukan sudah merupakan hal yang biasa/wajar dilakukan oleh orang lain pula, pelaku merasa berjasa besar terhadap organisasi dan seharusnya ia menerima lebih banyak dari yang diterimanya, pelaku menganggap tujuannya baik yaitu untuk mengatasi masalah dan nanti akan dikembalikan.



3) Teori GONE

Dalam teori ini terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan kecurangan, yaitu:

a. *Greed* (Keserakahan)

Berkaitan dengan perilaku serakah yang potensial ada dalam setiap diri seseorang

b. *Opportunity* (Kesempatan)

Berkaitan dengan keadaan organisasi, instansi, masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka bagi seseorang untuk melakukan kecurangan terhadapnya

c. *Need* (kebutuhan)

Berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu untuk menunjang hidupnya secara wajar.

d. *Exposure* (Pengungkapan)

Berkaitan dengan kemungkinan dapat diungkapkannya suatu kecurangan dan sifat serta beratnya hukuman terhadap pelaku kecurangan. Semakin besar kemungkinan suatu kecurangan dapat diungkap/ditemukan, semakin kecil dorongan seseorang untuk melakukan kecurangan tersebut. Semakin berat hukuman kepada pelaku kecurangan akan semakin kurang dorongan seseorang untuk melakukan kecurangan.

4) Teori Monopoli (*Klinggard Theory*)

Menurut teori ini korupsi (C) diartikan sama dengan monopoli (*Monopoly* = M) ditambah kebijakan (*Decretism* = D) dikurangi pertanggungjawaban (*Accountability* = A). *Fraud* (Kecurangan) sangat bergantung pada monopoli

saan yang dipegang oleh yang bersangkutan dan kebijakan yang di

ra. Namun kedua faktor itu dipengaruhi pula oleh kondisi akuntabilitas.



Pertanggungjawaban (*Accountability*) yang baik cenderung akan mempersempit peluang atau kesempatan bagi pelakunya.

2.1.6.3. Tujuan Pencegahan *Fraud*

Fraud merupakan masalah yang ada didalam lingkungan perusahaan, dan harus dicegah sedini mungkin. Pencegahan *fraud* yang efektif memiliki lima tujuan, menurut Diaz Priantara (2013:183) adalah sebagai berikut:

- a. *“Prevention-* mencegah terjadinya fraud secara nyata pada semua lini organisasi
- b. *Deterrence-* menangkal pelaku potensial bahkan tindakan yang bersifat coba-coba karena pelaku potensial melihat sistem pengendalian risiko fraud efektif berjalan dan telah memberi sanksi tegas dan tuntas sehingga membantu jera (takut) pelaku potensial.
- c. *Disruption-* mempersulit gerak langkah pelaku fraud sejauh mungkin
- d. *Identification* - mengidentifikasi kegiatan berisiko tinggi dan kelemahan pengendalian.
- e. *Civil action prosecution-* melakukan tuntutan dan penjatuhan sanksi yang setimpal atau perbuatan curang kepada pelakunya.”

Sedangkan pencegahan *fraud* menurut Amin Widjaja Tunggal (2005: 33),yaitu:

- 1.Ciptakan iklim budaya jujur, keterbukaan, dan saling membantu
- 2.Proses rekrutmen yang jujur
- 3.Pelatihan *fraud awarenss*
- 4.Lingkup kerja yang positif
- 5.Kode etik yang jelas, mudah dimengerti, dan ditaati

dan bantuan kepada pegawai yang mendapat kesulitan



7. Tanamkan kesan bahwa setiap tindakan kecurangan akan mendapatkan sanksi yang setimpal.”

Adapun penjelasan dari tata kelola pencegahan fraud tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ciptakan iklim budaya jujur, keterbukaan, dan saling membantu

Riset menunjukkan bahwa cara yang paling efektif untuk mencegah dan menghalangi fraud adalah mengimplementasikan program serta pengendalian anti fraud, yang didasarkan pada nilai-nilai yang dianut perusahaan. Nilai-nilai semacam itu menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku dan ekspektasi yang dapat diterima, bahwa pegawai dapat menggunakan nilai itu untuk mengarahkan tindakan mereka. Nilai-nilai itu membantu menciptakan budaya jujur, keterbukaan, dan saling membantu antar sesama anggota organisasi atau perusahaan.

2. Proses rekrutmen yang jujur

Dalam upaya membangun lingkungan pengendalian yang positif, penerimaan pegawai merupakan awal dari masuknya orang-orang yang terpilih melalui seleksi yang ketat dan efektif untuk mengurangi kemungkinan memperkerjakan dan mempromosikan orang-orang yang tingkat kejujurannya rendah. Hanya orang-orang yang dapat memenuhi syarat tertentu yang dapat diterima. Kebijakan semacam itu mungkin mencakup pengecekan latar belakang orang-orang yang dipertimbangkan akan dipekerjakan atau dipromosikan menduduki jabatan yang bertanggung jawab.

Pengecekan latar belakang memverifikasi pendidikan, riwayat pekerjaan, serta referensi pribadi calon karyawan, termasuk referensi tentang karakter

tegritas. Pelatihan secara rutin untuk seluruh pegawai mengenai nilai-erusahaan dan aturan perilaku, dalam review kinerja regular termasuk



diantaranya evaluasi kontribusi pegawai/individu dalam mengembangkan lingkungan kerja yang positif sesuai dengan nilai-nilai perusahaan, dan selalu melakukan evaluasi obyektif atas kepatuhan terhadap nilai-nilai perusahaan dan standar perilaku, dan setiap pelanggaran ditangani segera.

3. Pelatihan *fraud awareness*

Semua pegawai harus dilatih tentang ekspektasi perusahaan menyangkut perilaku etis pegawai. Pegawai harus diberi tahu tentang tugasnya untuk menyampaikan *fraud* aktual atau yang dicurigai serta cara yang tepat untuk menyampaikannya. Selain itu pelatihan kewaspadaan terhadap kecurangan juga harus disesuaikan dengan tanggung jawab pekerjaan khusus pegawai itu. Keahlian yang diberikan dalam organisasi untuk pelatihan keterampilan dan pengembangan karir karyawannya, termasuk semua tingkatan karyawan, baik sumber daya internal maupun eksternal. Pelatihan tersebut bermaksud untuk membantu meningkatkan pegawai dalam melaksanakan tugas yang diberikan agar tidak terjadi banyak kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Berikut merupakan serangkaian pelatihan yang perlu diperhatikan dan diterapkan pada setiap karyawan di perusahaan secara eksplisit agar dapat mengadopsi harapan-harapan yang baik untuk perusahaan, diantaranya:

- a. Kewajiban-kewajiban mengkomunikasikan masalah-masalah tertentu yang dihadapi.
- b. Membuat daftar jenis-jenis masalah.
- c. Bagaimana mengkomunikasikan masalah-masalah tersebut dan adanya kepastian dari manajemen mengenai harapan tersebut



4. Lingkup kerja yang positif

Dari beberapa riset yang telah dilakukan terlihat bahwa pelanggaran lebih jarang terjadi bila karyawan mempunyai perasaan positif tentang atasan mereka ketimbang bila mereka merasa diperalat, diancam, atau diabaikan. Pengakuan dan sistem penghargaan (reward) sesuai dengan sasaran dan hasil kinerja, kesempatan yang sama bagi semua pegawai, program kompensasi secara profesional, pelatihan secara profesional dan prioritas organisasi dalam pengembangan karir akan menciptakan tempat kerja yang nyaman dan positif. Tempat kerja yang positif dapat mendorong semangat kerja pegawai, yang dapat mengurangi kemungkinan pegawai melakukan tindakan curang terhadap perusahaan.

5. Kode etik yang jelas, mudah dimengerti dan ditaati

Kode etik pada umumnya selalu sejalan dengan moral manusia dan merupakan perluasan dari prinsip-prinsip moral tertentu untuk diterapkan dalam suatu kegiatan. Membangun budaya jujur, keterbukaan dan memberikan program bantuan tidak dapat diciptakan tanpa memberlakukan aturan perilaku dan kode etik di lingkungan pegawai. Harus dibuat kriteria apa saja yang dimaksud dengan perilaku yang jujur dan tidak jujur, perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang. Semua ketentuan ini dibuat secara tertulis dan diinternalisasikan (disosialisasikan) ke seluruh karyawan dan harus mereka setujui dengan membubuhkan tanda tangannya. Pelanggaran atas aturan perilaku kode etik harus dikenakan sanksi.

6. Program bantuan kepada pegawai yang mendapat kesulitan

Masalah ataupun kesulitan pasti akan dialami oleh setiap pegawai atau van pada setiap perusahaan, sehingga tidak sedikit dari mereka yang ukan berbagai macam kecurangan guna keluar dari masalah yang



dihadapinya dalam masalah keuangan akibat desakan ekonomi yang ada, penyimpangan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Bentuk perhatian dan bantuan tersebut sebaiknya dapat diberikan kepada pegawai guna mencegah adanya kecurangan serta penyelewengan terhadap keuangan perusahaan, serta menjadi dukungan dan solusi dalam menghadapi permasalahan dan desakan ekonomi yang dimiliki para pegawai sehingga dapat meminimalisir kerugian perusahaan terhadap kecurangan.

7. Tanamkan kesan bahwa setiap tindakan kecurangan akan mendapatkan sanksi yang setimpal.

Strategi pencegahan kecurangan yang terakhir yaitu dengan menanamkan kesan bahwa setiap tindakan kecurangan akan mendapatkan sanksi. Pihak perusahaan khususnya pihak manajemen perusahaan harus benar-benar menanamkan sanksi, maksudnya membuat dan menjalankan suatu peraturan terhadap setiap tindak kecurangan yang ada sehingga, perbuatan menyimpang dalam perusahaan dapat diminimalisir, dan memberikan efek jera terhadap oknum yang akan ataupun yang sudah melakukan tindakan curang. Pencegahan kecurangan lebih baik dari pada mengatasi kecurangan, oleh karena itu perlu kerjasama yang baik bersama-sama pada setiap anggota organisasi perusahaan guna mensejahterakan suatu perusahaan, karena apabila suatu perusahaan dapat berkembang dan maju kearah lebih baik, maka sejahtera pula seluruh karyawan yang ada dalam perusahaan. Serta apabila seluruh bagian karyawan dapat menjalankan tugasnya sebaik mungkin, maka dapat melatih pula moral, etika, serta teladan yang baik pada jiwa setiap karyawan.



2.1.6.4. Faktor-Faktor Lain yang Berpengaruh Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud)

1. Auditor Eksternal

Salah satu peran auditor eksternal menurut Anggriawan (2014) adalah untuk memberikan keyakinan kepada pihak yang berkepentingan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai standar yang berlaku serta mencerminkan keadaan yang sebenarnya atas suatu entitas bisnis. Selain itu peran auditor eksternal adalah memastikan laporan keuangan tidak mengandung salah saji (misstatement) yang material baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan (fraud).

Kemampuan mendeteksi fraud adalah sebuah kecakapan atau keahlian yang dimiliki auditor untuk menemukan indikasi mengenai fraud. Menurut Kumaat (2011) mendeteksi kecurangan adalah upaya untuk mendapatkan indikasi awal yang cukup mengenai tindak kecurangan, sekaligus mempersempit ruang gerak para pelaku kecurangan.

Salah satu cara mencegah pelanggaran akuntansi sehingga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat adalah dengan melakukan whistleblowing. Fultanegara (2010) menyatakan bahwa whistleblowing yang dilakukan oleh akuntan merupakan salah satu cara terpenting untuk mendeteksi kecurangan, pemborosan, dan penyalahgunaan wewenang atau sumber daya oleh perusahaan.

2. Pengendalian Internal

Menurut Gusnardi (2012) ada ungkapan yang secara mudah ingin menjelaskan penyebab atau akar permasalahan dari fraud. Ungkapan itu adalah:



... need, by greed, and by opportunity. Ungkapan tersebut diartikan jika kita mencegah fraud, hilangkanlah atau tekan sekecil mungkin penyebabnya.

Pencegahan fraud dapat dilakukan dengan mengaktifkan internal control, internal control yang aktif biasanya merupakan bentuk internal control yang paling banyak diterapkan. Ia seperti pagar-pagar yang menghalangi pencuri masuk ke halaman rumah orang. Seperti pagar, bagaimanapun kokohnya tetap dapat ditembus oleh pelaku fraud yang cerdik dan mempunyai nyali untuk melakukannya.

Pengendalian internal berperan penting dalam menekan suatu peluang yang dapat menciptakan terjadinya fraud. Hal ini dikemukakan oleh Tunggal (2013:13) sebagai berikut:

“Ketika kecurangan dilihat dari segi perspektif penilaian risiko kita dapat katakan kondisi tertentu dari manusia dan kondisi lingkungan utama yang meningkatkan tingkat tekanan untuk kecurangan salah satunya adalah pengendalian internal tidak cukup, tidak ada, kelemahan, kecerobohan dalam melakukan pengendalian”.

3. Penerapan *Good Corporate Governance*

Achmad (2005) menjelaskan penerapan *Good Corporate Governance* sebagai berikut:

“Pelaksanaan penerapan *Good Corporate Governance* di perusahaan penting bagi perusahaan untuk melakukan pentahapan yang cermat berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi perusahaan dan tingkat kesiapannya, sehingga penerapan *Good Corporate Governance* dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh unsur di dalam perusahaan”.

Sutedi (2011) mengemukakan pengertian *good corporate governance* secara definitif adalah: “Sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan nciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua stakeholder”.



Sementara itu, OECD (*Organization for Economic Co-Operation and Development*) (dalam Setiawan, 2014) memberikan pengertian *good corporate governance* sebagai berikut:

“Bentuk hubungan antara manajemen suatu perusahaan, board of directors, pemegang saham, dan stakeholder lainnya. Hubungan ini meliputi berbagai aturan dan insentif terbentuknya struktur dan tujuan perusahaan yang pasti, dan cara mencapai tujuan serta pengawasan kerja perusahaan”.

2.1.6.5. Tanggung jawab dalam Pencegahan Fraud

Audit internal mengacu pada (Boulescu M., 2003) tinjauan permanen dari aktivitas ekonomi suatu entitas; sebuah aktivitas independen untuk menilai atas nama manajemen entitas ekonomi yang melibatkan pemeriksaan keuangan, akuntansi, dan jenis operasi lain mengenai layanan secara keseluruhan; evaluasi tugas dan kesesuaian entri akuntansi, laporan, aset, modal, dan hasil; atau pengesahan atau sertifikasi dokumen akuntansi keuangan.

Tanggung jawab mengenai pencegahan penipuan dalam suatu organisasi dibagi antara dewan eksekutif, komite audit, dan audit internal (Munteanu V., Zuca M., Zuca S, 2010). Pertama, eksekutif dewan memiliki tanggung jawab akhir untuk menerapkan mekanisme mendeteksi dan mencegah penipuan sejak dini. Anggota dewan eksekutif adalah mereka yang harus memberikan penjelasan jika menemukan kasus tertentu penipuan.

Menurut Standar Nasional tentang Audit 240 '*Fraud and Error*' (SNA 240), dewan eksekutif adalah bertanggung jawab atas pencegahan dan deteksi penipuan dan kesalahan dengan menerapkan dan memelihara akuntansi yang sesuai dan sistem kontrol internal. Sistem ini juga dapat mengurangi insiden penipuan dan kesalahan terjadi, tetapi mereka tidak bisa sepenuhnya menghilangkannya. Kedua, komite audit memiliki peran mengawasi



manajemen risiko penipuan dan secara aktif memantau upaya dewan eksekutif terhadap penipuan yang dilakukan. Ketiga, internal audit merupakan garis pertahanan yang efisien terhadap penipuan, memiliki peran baik dalam memantau risiko, maupun dalam penipuan pencegahan dan deteksi. Audit internal merupakan alat yang dimiliki oleh komite audit, satu-satunya mampu secara independen menilai risiko penipuan dan tindakan anti-penipuan yang diterapkan oleh dewan eksekutif.

Ada perbedaan yang jelas antara auditor internal dan spesialis dalam investigasi penipuan, baik dari sudut pandang pandangan tentang peran dan tanggung jawab mereka, serta dalam hal pelatihan profesional dan spesialisasi mereka. Peran dari auditor internal juga tergantung pada pelatihan profesional dan kemampuan praktisnya. Dalam praktiknya, peran audit internal dapat mencakup serangkaian tanggung jawab: mendukung manajemen di membangun mekanisme anti-penipuan yang dapat diaudit; memfasilitasi penilaian risiko penipuan dan reputasi di tingkat tersebut tentang suatu organisasi dan proses bisnisnya; menilai hubungan antara risiko penipuan dan kontrol internal; penipuan audit; mendukung spesialis dalam investigasi penipuan; mendukung upaya untuk memperbaiki kekurangan; dan melaporkan kepada komite audit masalah tentang mekanisme anti-penipuan, penipuan dan risiko reputasi penilaian, atau kasus penipuan dan kecurigaan (Petraècu D, 2014).

Auditor internal harus memiliki tingkat pengetahuan teoretis dan pengalaman praktis yang unggul berhasil menyelesaikan peran mereka. Mereka harus mengetahui kemungkinan skema dan skenario penipuan yang spesifik untuk suatu bidang pekerjaan organisasi (misalnya asuransi, ritel, nikasi, dll.) dan dapat mengenali tanda-tanda kemungkinan skema . Untuk implementasi semua yang disebutkan di atas, ada kebutuhan



besar untuk berinvestasi dalam spesialisasi auditor internal dengan membiayai kursus di bidang tertentu. Organisasi lain menghubungi spesialis eksternal (di dasar kontrak layanan) untuk melakukan tugas audit, berpikir bahwa dengan cara ini mereka menerima tingkat tinggi spesialis dengan harga relatif sederhana.

2.2. Tinjauan Empiris

2.2.1. Penelitian Terdahulu

Tinjauan empiris dalam penelitian ini merupakan ringkasan penelitian terdahulu. Penelitian terkait dengan pengaruh sistem informasi akuntansi, peran auditor internal dan pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* Beberapa perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada variabel independen dan dependennya.

Beberapa bukti empiris mengenai sistem informasi akuntansi terhadap pencegahan fraud dilakukan oleh Aulia rahmayanti (2020) yang berjudul pengaruh pengendalian internal, sistem informasi akuntansi dan komitmen organisasi terhadap pencegahan kecurangan akuntansi hasil menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh negatif signifikan terhadap pencegahan kecurangan akuntansi. Penelitian juga dilakukan oleh Ulfa nita dewi (2021) pengaruh pengendalian internal sistem informasi akuntansi dan profesionalisme auditor internal terhadap upaya pencegahan fraud dalam pengelolaan persediaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap upaya pencegahan kecurangan dan Sunaryo, *et al.*, (2019) pengaruh kesesuaian kompensasi, sistem informasi akuntansi dan keefektifan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan

- i. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap kecenderungan kecurangan.



Risdayana (2022) Sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud sistem informasi akuntansi yang baik dapat meminimalisir terjadinya kecurangan. Artinya, semakin baik sistem informasi akuntansi dalam suatu organisasi, maka dapat mencegah terjadinya fraud.

Mohammad Reza Syah Pahlevi dan Dwi Ari Pertiwi (2021) sistem informasi akuntansi tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan fraud, faktor pertama adalah karena sistem informasi akuntansi perusahaan di nilai sedikit rumit meski sebenarnya membantu dalam pengerjaan suatu laporan keuangan bagi para pegawai yang kurang dalam memahami akuntansi. Faktor kedua adalah sistem yang ada hanya dapat dioperasikan dengan menggunakan jaringan yang terdapat di kantor atau tidak dapat diakses di rumah, ini menjadikan para pegawai harus mengerjakan segala sesuatunya di kantor

Beberapa bukti empiris mengenai peran auditor internal terhadap pencegahan fraud dilakukan oleh Penelitian juga dilakukan oleh Nur Aisyah (2023) Peran Auditor Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud. Hal ini disebabkan karena auditor internal sangat memiliki peran yang besar di dalam perusahaan untuk mengendalikan dan mengevaluasi aktivitas kegiatan perusahaan terutama dalam pencegahan fraud.

Saipul Hajat dan Eka Rima Prasetya (2021) Peranan audit internal berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Audit internal yang dilakukan oleh pihak manajemen dalam suatu perusahaan akan mengurangi terjadinya tindak kecurangan (fraud) bahkan dapat mencegah terjadinya fraud.

Didi Permadi Adi Saputra dan Ghina Fitri Ariesta Susilo (2022) Peran internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud .
udit internal pada perusahaan sangat diperlukan dalam pencegahan



fraud. Hal tersebut berdasarkan kegiatan operasional perusahaan pasca pandemi yang meningkat sehingga kondisi keuangan perusahaan akan semakin kompleks. Oleh karena itu, audit pada perusahaan harus dilakukan untuk mencegah terjadinya fraud terhadap laporan keuangan perusahaan. Bertujuan agar dapat melindungi aset yang dimiliki perusahaan serta terhindar dari kerugian

Oli gretia nitsae (2020) Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran auditor internal tidak berpengaruh terhadap kecurangan fraud. auditor internal belum mampu mengurangi kecurangan adalah bahwa peran dan kemampuan profesional dari auditor internal belum maksimal dilakukan dalam proses pemeriksaan untuk dapat mencegah kecurangan.

Beberapa bukti empiris mengenai pengendalian internal terhadap pencegahan fraud dilakukan oleh Haidar humam, *et al.*, (2020) efektifitas pengendalian intern dalam Mencegah kecurangan pencegahan kecurangan di perusahaan daerah hasil penelitian menunjukan bahwa pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan .

Agus Budi Hartono dan Arief Himmawan Dwi Nugroho (2022) pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud. Maka semakin bagus suatu penerapan pengendalian internal perusahaan maupun lembaga, maka semakin meningkat pula pencegahan terhadap sebuah kecurangan yang terjadi dalam sesuatu perusaahaan ataupun lembaga dimana sudah ada pengendalian internal yang meningkatkan upaya pencegahan kecurangan (fraud)

Marciano *et al.*, (2021) pengendalian internal merupakan upaya efektif mencegah terjadinya kecurangan pada suatu organisasi. Dengan alian internal yang baik, karyawan diharapkan tidak melakukan tindakan



yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan dapat menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif .

Tuti Meutia (2021) Pengendalian internal tidak berpengaruh dalam pencegahan fraud pada RSUD Aceh Timur. Ini menunjukkan bahwa semakin baik dan efektif system pengendalian internal maka semakin kecil pula kejadian kecurangan di instansi tersebut.

Utama *et al.*, (2022) Pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan fraud semakin baik pengendalian internal yang ada di dalam suatu gereja, maka aktivitas pencegahan fraud di dalam gereja tersebut juga akan semakin meningkat.

